

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Desa memegang peranan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Indonesia karena merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Desa bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan juga merupakan ruang bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik warga. Di desa, berbagai aktivitas masyarakat berlangsung, meliputi pemenuhan kebutuhan hidup, interaksi sosial, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan pemerintahan yang langsung berkaitan dengan kepentingan warga. Oleh sebab itu, desa menjadi salah satu titik utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata. Pembangunan nasional tidak akan berjalan maksimal jika pembangunan di tingkat desa belum mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Secara hukum, keberadaan desa telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa beserta hak asal usulnya, serta menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Melalui regulasi tersebut, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Dengan demikian, desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek penerima

kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah, melainkan sebagai entitas yang memiliki otonomi untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, desa diharapkan mampu mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar, adanya akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Dalam kerangka ini, pembangunan desa harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Secara normatif, kondisi ideal atau **das sollen** dalam pembangunan desa adalah terciptanya desa yang mandiri, partisipatif, inovatif, dan sejahtera. Desa seharusnya mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah, serta badan usaha milik desa. Masyarakat desa perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam kondisi ideal ini, kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pemimpin transformasional yang

mampu menggerakkan masyarakat, membangun semangat kolektif, menciptakan inovasi, serta memastikan kebijakan desa mengutamakan kebutuhan warga. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berlangsung secara partisipatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realitas atau **das sein** di lapangan. Dalam praktiknya, banyak desa menghadapi kendala dalam memanfaatkan kewenangan yang diberikan negara. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kreativitas dalam pengelolaan potensi desa, peran lembaga ekonomi desa yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang kurang maksimal menjadi hambatan serius dalam pembangunan desa. Di banyak desa, program pembangunan memang sudah berjalan, tetapi hasilnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan kenyataan empiris.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Desa ini merupakan wilayah agraris di mana sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan usaha informal. Ketergantungan yang tinggi pada pertanian tradisional menyebabkan pendapatan masyarakat sangat bergantung pada musim, hasil panen, dan harga komoditas. Saat musim panen baik, masyarakat mungkin memperoleh penghasilan cukup, tetapi ketika musim kurang menguntungkan atau harga hasil pertanian menurun, kondisi ekonomi masyarakat ikut

melemah. Situasi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum stabil dan masih rentan terhadap perubahan kondisi eksternal. Selain itu, Desa Pungpungan sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Desa ini kaya akan sumber daya pertanian yang berpeluang dikembangkan, usaha kecil yang dapat diperkuat, serta kelembagaan ekonomi seperti BUMDes yang seharusnya menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Namun, pada kenyataannya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Inovasi usaha masih terbatas, kapasitas pengelola belum merata, dan sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat perlu ditingkatkan. Akibatnya, BUMDes belum dapat berfungsi secara maksimal sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga belum berkembang secara signifikan. Meskipun musyawarah desa telah dijalankan sebagai forum partisipatif, keterlibatan masyarakat seringkali masih bersifat formalitas. Banyak warga hadir, tetapi belum aktif menyampaikan gagasan, kritik, atau aspirasi secara mendalam. Padahal, partisipasi aktif masyarakat merupakan syarat penting dalam pembangunan desa yang demokratis. Tanpa partisipasi yang nyata, program pembangunan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, permasalahan di Desa Pungpungan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut kepemimpinan dan partisipasi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana kepala desa dapat menjalankan peran kepemimpinan yang efektif dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Kepala desa tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, melainkan harus menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan, menginspirasi, dan memfasilitasi perubahan. Dalam konteks tersebut, konsep kepemimpinan transformasional sangat relevan sebagai alat analisis. Kepemimpinan transformasional dianggap mampu menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat membawa perubahan melalui pengaruh moral, motivasi, stimulasi intelektual, serta perhatian terhadap kebutuhan individu. Burns (1978) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional adalah suatu proses kepemimpinan yang mengangkat baik pemimpin maupun pengikut ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi melalui hubungan timbal balik yang mampu mengubah nilai-nilai dasar. Selanjutnya, Bass (1998) mengembangkan konsep tersebut dengan model Full Range Leadership Development (FRLD) yang terdiri dari empat dimensi utama, yaitu *Idealized Influence (Pengaruh yang Ideal)*, *Inspirational Motivation (Motivasi Inspiratif)*, *Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual)*, dan *Individualized Consideration (Pertimbangan Individual)*. Keempat dimensi ini menjadi indikator penting untuk menilai apakah seorang kepala desa benar-benar menerapkan kepemimpinan transformasional.

Dimensi *Idealized Influence (Pengaruh yang Ideal)* merujuk pada kemampuan pemimpin untuk menjadi teladan yang dihormati, dipercaya, dan

dijadikan panutan oleh masyarakat. Pemimpin dengan dimensi ini menunjukkan integritas, kejujuran, ketegasan, serta konsistensi antara perkataan dan tindakannya. Dalam konteks pemerintahan desa, dimensi ini sangat penting karena kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa akan memengaruhi tingkat dukungan dan partisipasi warga dalam program-program pembangunan. Jika kepala desa dipandang sebagai sosok yang adil, transparan, dan dapat dipercaya, maka masyarakat akan lebih mudah diajak bekerja sama.

Dimensi *Inspirational Motivation (Motivasi Inspiratif)* berkaitan dengan kemampuan kepala desa dalam menyampaikan visi, tujuan, dan harapan pembangunan secara meyakinkan kepada masyarakat. Pemimpin yang memiliki motivasi ini mampu membangun optimisme bersama, menumbuhkan semangat kolektif, dan mengarahkan masyarakat agar memiliki tujuan yang sama. Dalam pemerintahan desa, dimensi ini sangat penting karena keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap arah dan tujuan program yang dijalankan. Kepala desa harus mampu mengkomunikasikan visi pembangunan dengan jelas serta membangkitkan keyakinan bahwa desa dapat berkembang menjadi lebih baik. Dimensi **stimulasi intelektual** mengacu pada kemampuan pemimpin dalam mendorong masyarakat untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif dalam mencari solusi atas berbagai masalah. Pemimpin dengan dimensi ini tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, mencoba pendekatan baru,

dan meninggalkan kebiasaan lama yang kurang produktif. Dalam konteks desa agraris seperti Desa Pungpungan, dimensi ini sangat penting karena masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan inovasi ekonomi, memperluas jenis usaha, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mengoptimalkan peran BUMDes. Tanpa adanya stimulasi intelektual, masyarakat cenderung bertahan pada pola lama yang menghambat perkembangan.

Dimensi **pertimbangan individual** adalah kemampuan pemimpin untuk memberikan perhatian secara personal terhadap kebutuhan, potensi, dan perkembangan setiap individu atau kelompok masyarakat. Pemimpin tidak hanya memandang masyarakat sebagai satu kesatuan umum, tetapi juga menyadari bahwa setiap kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda. Dalam konteks desa, perhatian ini dapat diwujudkan melalui pembinaan pelaku usaha kecil, pendampingan petani, pelatihan bagi pemuda, serta dukungan kepada kelompok rentan. Dengan perhatian yang bersifat individual, kepala desa dapat memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.

Dari keempat dimensi tersebut, **stimulasi intelektual** merupakan indikator yang paling relevan dengan permasalahan yang dihadapi di Desa Pungpungan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa desa masih mengalami keterbatasan dalam inovasi, ketergantungan pada pertanian tradisional, serta pengelolaan BUMDes yang belum maksimal. Permasalahan

ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terdorong untuk mengembangkan metode baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Apabila kepala desa mampu memberikan stimulasi intelektual melalui pelatihan, pendampingan, forum diskusi, dan pengembangan inovasi ekonomi desa, maka masyarakat akan lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi lokal. Dengan demikian, dimensi stimulasi intelektual memiliki kaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual secara layak. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, partisipasi sosial, rasa aman, serta kemampuan untuk berkembang. Dalam konteks Desa Pungpungan, kesejahteraan masyarakat dapat diamati dari kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup, tersedianya lapangan kerja, peningkatan peran BUMDes, berkembangnya usaha produktif, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, kesejahteraan merupakan hasil akhir yang diharapkan dari proses kepemimpinan dan pembangunan desa yang efektif.

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, terdapat beberapa studi yang membahas kepemimpinan transformasional kepala desa dalam berbagai konteks. Penelitian Andarista dan Kriswibowo (2023) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala desa mampu mendorong inovasi pembangunan desa melalui pelayanan berbasis digital dan pengembangan

program inovatif. Ahyat (2023) meneliti kepemimpinan transformasional dalam pembangunan desa berbasis digital dan menemukan bahwa kepemimpinan yang adaptif terhadap teknologi dapat meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Wahyuningsih (2021) juga mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional dapat menghasilkan berbagai inovasi desa yang berdampak pada pembangunan. Selain itu, Kurniawan dan Sari (2023) membahas peran kepemimpinan transformasional kepala desa dalam menghadapi pandemi COVID-19, sementara Balya et al. (2024) menyoroti kontribusi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan partisipasi publik.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat ruang yang belum banyak dieksplorasi. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak membahas aspek inovasi, digitalisasi, partisipasi, atau penanganan krisis, namun belum secara khusus mengkaji hubungan antara kepemimpinan transformasional kepala desa dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa agraris yang masih menghadapi tantangan ekonomi tradisional. Inilah yang menjadi **kesenjangan penelitian** dalam studi ini. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama, bukan hanya inovasi pembangunan atau partisipasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam hal objek, fokus, serta hubungan antara teori dan realitas empiris. Kesenjangan penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa teori kepemimpinan transformasional belum sepenuhnya diterapkan

dalam konteks desa agraris seperti Desa Pungpungan. Banyak penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional efektif dalam mendorong perubahan, namun belum banyak yang mengaitkannya secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat desa dalam arti yang lebih luas. Padahal, kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran yang lebih substansial dibandingkan hanya keberhasilan program atau peningkatan status desa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kepala desa memimpin, tetapi juga bagaimana gaya kepemimpinan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan kepala desa memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Desa Pungpungan sebagai desa agraris masih menghadapi berbagai permasalahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan tersebut terlihat dari masih bergantungnya masyarakat pada sektor pertanian tradisional yang sangat dipengaruhi musim dan harga komoditas, sehingga pendapatan masyarakat belum stabil. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berjalan secara optimal sebagai penggerak ekonomi desa, inovasi dalam pengembangan usaha masyarakat masih terbatas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa cenderung belum maksimal dan masih bersifat formalitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi

desa belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, teori kepemimpinan transformasional memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis bagaimana kepala desa dapat menjadi agen perubahan melalui empat dimensi utama kepemimpinan. Kaitan antara permasalahan penelitian dengan indikator *Intellectual Stimulation* (Stimulasi Intelektual) menunjukkan bahwa persoalan utama di Desa Pungpungan terletak pada belum optimalnya upaya kepala desa dalam mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif, berinovasi, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kurangnya stimulasi terhadap ide-ide baru, pengembangan usaha produktif, dan pemanfaatan potensi desa menyebabkan masyarakat masih bertahan pada pola-pola lama yang kurang mampu meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dengan demikian, penelitian ini membahas “ bagaimana kepemimpinan transformasional kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?” menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

mendalam tentang peran kepala desa sebagai pemimpin transformasional serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pembangunan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Definisi masalah dalam penelitian merupakan penjelasan mengenai kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga menimbulkan suatu persoalan yang perlu diteliti secara ilmiah. Menurut (Sugiyono, 2016) , masalah penelitian adalah penyimpangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga memerlukan penjelasan dan solusi melalui penelitian. Rumusan masalah penelitian adalah inti dari pertanyaan besar yang ingin dijawab peneliti. (Sugiyono, 2019) menyebutnya sebagai “seni menyederhanakan kompleksitas fenomena menjadi pertanyaan terarah” jadi, bukan cuma soal teori, tapi juga bagaimana fakta di lapangan sering

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kepemimpinan Transformational Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?”

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kepemimpinan Transformational Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Secara teoritis

Penelitian ini benar-benar menambah warna dalam studi administrasi publik. Peneliti membawa bukti nyata bukan hanya angan-angan tentang bagaimana teori kepemimpinan transformasional Bass-Avolio, yang biasanya dipakai di organisasi Barat, ternyata bisa nyambung juga di desa -desa Indonesia, khususnya yang kental dengan nilai -nilai Jawa Timur seperti guyub rukun dan tepa slira. Bukan hanya angka-angka seperti yang dipakai Hidayatulloh (2026) atau Praptiwi (2023), penelitian ini masuk lewat cerita dan pengalaman pribadi warga. Peneliti menggali lewat 18 wawancara mendalam dan ikut langsung dalam kehidupan desa, mencari tahu seperti apa perubahan kepemimpinan di mata mereka. Peneliti menawarkan sudut penelitian baru, dimensi fenomenologis yang selama ini kurang diangkat. Ini

sekaligus memperkuat model pengembangan Full Range Leadership Development (FRLD) yang lebih membumi di Indonesia. Terutama, model ini bisa langsung dipakai di birokrasi tingkat mikro dan masuk ke kurikulum Administrasi Publik di Universitas Bojonegoro.

2) Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah Desa Pungpungan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi terhadap praktik kepemimpinan yang telah dijalankan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana peran kepala desa dalam menggerakkan masyarakat, mengelola program pembangunan, serta mengoptimalkan potensi desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan desa yang lebih efektif, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal.

b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis dalam menerapkan kepemimpinan yang lebih inovatif dan partisipatif. Temuan penelitian ini dapat membantu kepala desa dalam memahami pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi, komunikasi yang efektif, serta pendekatan

yang lebih humanis dalam pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi konkret mengenai bagaimana mengembangkan program-program desa seperti BUMDes, UMKM, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c) Bagi Pengelola BUMDes

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk pemahaman mengenai peran kepemimpinan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan usaha desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDes, mengembangkan inovasi usaha, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pelaku ekonomi lokal. Dengan demikian, BUMDes dapat berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembangunan desa. Dengan memahami pentingnya peran masyarakat dalam mendukung program pembangunan, diharapkan masyarakat tidak lagi bersifat pasif, tetapi aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan desa, baik dalam musyawarah desa, kegiatan ekonomi, maupun program pemberdayaan. Hal ini akan mendorong terciptanya kemandirian

masyarakat serta memperkuat modal sosial desa.

e) Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun program pelatihan kepemimpinan kepala desa, penguatan kelembagaan desa, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam melakukan replikasi model kepemimpinan dan pembangunan desa yang berhasil ke desa-desa lain dengan karakteristik yang serupa

f) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan dalam mengembangkan kajian terkait kepemimpinan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang berbeda, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta memperluas objek penelitian ke desa-desa lain untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam pembahasan terhadap materi penulisan skripsi, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan garis besar penelitian terkait dengan judul penelitian yang mengemukakan Latar Belakang penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan telaah pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi Lpenelitisan Teori dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Narasumber/ Informan dan Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil temuan di lapangan terkait peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan konsep yang digunakan, sehingga dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai kondisi nyata di Desa Pungpungan, termasuk aspek kepemimpinan, pengelolaan BUMDes, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan. Kesimpulan membahas bab-bab sekaligus memberikan jawaban tujuan penelitian, dan saran yang disampaikan sebagai masukan terkait permasalahan dan masalah penelitian.